BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utamaini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator)* atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang takterpisahkan dari system Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajem enpemerintahan yang transparan, partisipatif, akun table dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan dayasaing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azasazasumum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabiltas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemerintahan yang akun table merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal, tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat ,jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Kopo menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapatmem berikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolakukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Serang khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperolah gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran darivisi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan danpencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menja dipenanda dalam menentukan program dankegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dariinstansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yangada di Kabupaten Serang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama inidapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalampelaksanaan pembangunan.

Serang, April 2024

CAMAT KOPO

IMRON,S.IP,M.Si

NIP. 198802152007011003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG

Unit OrganisasiPerangkat Daerah	:	KecamatanKopo
TugasPokok	:	Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan kepada bupati
Fungsi	:	1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa 8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa keamanan kantor 4. Penyediaan Jasa Pramubhakti dan Pengemudi 5. Penyediaan ATK 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan Kantor 8. Penyediaan

						bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluardaerah
		2. Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan peralatan Kantor 2. Pemerliaharaan rutin/berkala Gedung Kantor

						3. Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkalaperal atan Gedung kantor
		3. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan Desa, lembaga masyarakat, dan SKPD Kabupaten	Persenta sekewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1. Pembinaan tata pemerintahan desa 2. Penyelenggaran Musrenbang RKPD di Kecamatan 3. Dukungan penyelenggaran Pilkades
		4. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kecamatan dan	Persentase aparatur desa yang tingkat kehadirannya diatas 90%	Meningkatnya displin aparatur kecamatan dan desa	Program Peningkatan disiplin Aparatur	1. Diklat dan Bimbingan Teknis aparatur kecamatan dan

		Desa				Desa 2. Monitoring dan Evaluasi tingkat kehadiran aparatur Kecamatan dan Desa
		5. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Pembinaan Trantibum di Kecamatan
		6. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	Persentase swadaya gotong masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional	1. Pembinaan TP. PKK Kecamatan 2. Fasilitasi Kabupaten Serangsehat 3. Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

						Anak 4. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan' 5. Dukungan penyelenggaraan MTQ 6. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 7. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah